

NASIB MANTAN CAMAT KEDUNGBANTENG

Menunggu Salinan Putusan

BANYUMAS (KR) - Nasib mantan Camat Kedungbanteng Banyumas, Purjito (53) yang divonis bebas dan tidak bersalah melakukan korupsi dana eks PNP Mandiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang masih menunggu salinan putusan.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto saat dikonfirmasi Kamis (21/9) menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan dari Bagian Hukum Setda. "Saya lagi nunggu putusan dari Bagian Hukum. Kalau sudah inkrah tentu harus dikembalikan hak-haknya," kata Eko Prijanto.

Sebelumnya, Eko Purjito sempat diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Camat Sumbang akibat dugaan tersandung korupsi dana eks PNP. Kasus korupsi tersebut disangkakan kepadanya saat masih menjabat sebagai Camat Kedungbanteng.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Pengadilan Tinggi Semarang memvonis bebas tiga terdakwa korupsi dana eks PNP Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Ketiganya adalah Purjito yang saat itu menjabat Camat Kedungbanteng, Arif Indra Setyadi (Komisaris Utama PT LKM Kedungmas) dan Ida Rokhani (Direktur Utama PT LKM Kedungmas).

Atas putusan banding itu, jaksa dari Kejaksaan Negeri Purwokerto akan mengajukan kasasi. Sedangkan sebelumnya di Pengadilan Tipikor tingkat pertama, Purjito dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Dua terdakwa lainnya divonis lima tahun penjara. Selanjutnya penasihat hukum ketiga terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan hakim ketiga terdakwa divonis bebas dan tidak bersalah. (Dri)-d

JAMIN AIR LUMBUNG BERAS

Sukoharjo Miliki 13 Embung

SUKOHARJO (KR) - Kabupaten Sukoharjo total sudah memiliki 13 embung tersebar di sejumlah wilayah untuk menjamin ketersediaan air pertanian. Sebanyak 11 embung saat ini sudah digunakan dan dua embung lagi masih dalam proses pembangunan dan diperkirakan selesai sampai akhir Oktober mendatang.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno menyatakan sangat serius menjaga ketersediaan pangan untuk masyarakat. Apalagi Sukoharjo sejak sudah mampu swasembada beras.

Keberhasilan swasembada beras tersebut tidak lepas dari luasnya lahan pertanian. Termasuk juga jaminan ketersediaan air melalui berbagai sumber seperti Dam Colo Ngutur, Waduk Mulur Bendosari, dan beberapa embung yang berada di berbagai wilayah.

Saat ini air untuk mencukupi kebutuhan tanaman padi di Kabupaten Sukoharjo masih melimpah. Karena itu petani diminta mempercepat tanam padi dengan memanfaatkan air yang masih ada.

"Penanaman padi di musim kemarau ini diharapkan dapat meningkatkan produksi padi dan menambah stok pangan daerah. "Sekarang stok air masih melimpah sehingga kami terus-menerus minta petani menanam padi," kata Bagas. (Mam)-d

KARANGBAWANG DARI PURBALINGGA

Jadi Desa Anti Korupsi

PURBALINGGA (KR) - Lokasi geografis Desa Karangbawang Kecamatan Rembang terpencil dan jauh dari pengawasan oleh Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Meskipun demikian, Pemprov Jateng menetapkan desa tersebut menjadi Desa Anti Korupsi. Pelaksanaan penilaian desa anti korupsi ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari unsur Inspektorat Jateng, Dispermasdukcapil Jateng, Serta Dinas Kominfo Jateng, serta Inspektorat Pemkab Purbalingga, Dinpermades dan Dinkominfo Purbalingga.

"Setelah berdebat panjang, tim penilai memutuskan hasil penilaian desa anti korupsi dari Purbalingga adalah Desa Karangbawang dengan nilai skor 94," kata Sekretaris Inspektorat Provinsi Jateng, Zainul Ulum, baru-baru ini. Menurutnya, penilaian mengacu pada 18 indikator dalam lima komponen desa anti korupsi.

Kepala Dinpermasdes Purbalingga, Ato Susanto menyebutkan, Desa Karangbawang merupakan salah satu desa terpencil di Purbalingga dan sangat minim pengawasan. "Kalau Desa Karangbawang menjadi desa anti korupsi, desa lain yang aksesnya ebih mudah dijangkau akan lebih mudah dipantau atau kita awasi," ujarnya.

Kepala Desa Karangbawang Toyo menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan. Toyo mengklaim semua pelayanan bagi warganya tidak dipungut biaya. "Masyarakat kami tidak menggunakan gratifikasi. Membuat KTP dan KK, semuanya gratis. Itu yang saya terapkan di Desa Karangbawang," jelasnya. (Rus)-d

DI KABUPATEN SUKOHARJO

13 Desa Butuh Air Bersih

SUKOHARJO (KR) - Di Kabupaten Sukoharjo, ada 36 titik lokasi di 13 desa yang harus mendapat kiriman air bersih setiap hari. Disisi lain, hanya ada empat truk tangki yang dimiliki. Kondisi tersebut berdampak pada kesulitan proses pengiriman air bersih ke warga terdampak kekeurangan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo mengatakan pihaknya hanya ada empat truk tangki air bersih, dua truk tangki air bersih milik PMI dan dua truk tangki air bersih milik PDAM Sukoharjo. Jumlah truk tangki air bersih masih sangat kurang. "Total ada 36 titik lokasi kekeurangan yang harus dikirim air bersih setiap hari," jelasnya.

Menurutnya, setiap satu truk tangki air bersih maksimal melakukan pengangkutan pengiriman air bersih sebanyak empat kali pagi sampa sore atau petang hari. Tidak bisa sampai malam karena kondisi medan jalan yang curam dan berbukit. Satu truk tangki dalam setiap kali pengiriman mampu menampung 4.000 liter air bersih. "Ke depan, kami harap ada penambahan truk tangki air bersih. Tambahkan armada sangat penting, mengingat selalu dibutuhkan setiap kali musim kemarau," tandas Ariyanto. (Mam)-d

RDTR KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN

Dukung Wisata Budaya dan Agropolitan

KLATEN (KR) - Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan paparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Prambanan, Kamis (21/9) di Hotel Bidakara Jakarta.

Paparan dilakukan Sri Mulyani di hadapan Direktur Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I beserta seluruh jajarannya.

Juga hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jajang Prihono, dan para kepala OPD terkait.

"Mewakili Pemerintah Kabupaten Klaten, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang telah memfasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan di Kabupaten Klaten," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan tujuan

dari Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Prambanan adalah sebagai arahan perwujudan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, potensi dan daya saing kawasan. Bupati menyebut rencana struktur ruang sudah mengakomodir kebijakan strategis nasional, dan penyelarasan terhadap rencana struktur ruang RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten.

Disebutkan, tujuan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Prambanan adalah mewujudkan kawasan perkotaan Prambanan sebagai kawasan pariwisata budaya, agropolitan, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan. Adapun rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi,



Bupati bersama Ketua DPRD dan para kepala OPD Pemkab Klaten usai paparan RDTR di Jakarta.

rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan air minum, rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3, rencana jaringan persampahan, rencana jaringan drainase, dan rencana jaringan prasarana lainnya. "Rencana ini sudah mengakomodir kebijakan nasional dan provinsi," jelas bupati.

Bupati berharap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Prambanan segera selesai sehingga bisa mewujudkan Kla-

ten yang semakin maju, mandiri dan sejahtera. Selain itu, dapat menciptakan ruang kawasan yang produktif dan berkelanjutan. "Alhamdulillah tadi saya memaparkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Prambanan. Dengan adanya RDTR ini diharapkan pola ruang direncanakan dengan konsep menciptakan ruang kawasan yang produktif dan berkelanjutan," tandas Sri Mulyani. (Sit)-d

PENILAIAN DESA ANTI KORUPSI

Sijenggung Raih Nilai 97,5

jasasnya.

Diungkapkan, sejak Desa Sijenggung dicanangkan menjadi desa anti korupsi, semua komponen masyarakat mampu menjaga konsistensi 18 indikator yang ada dalam lima komponen desa anti korupsi. Lima komponen itu mencakup penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Menurut Agung, apa yang berjalan di Desa Sijenggung juga bisa menginspirasi desa-desa lain terkait dengan pelayanan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebelumnya, pada 10 Mei 2023 Pemerintah Desa Sijenggung, bersama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ju-

ga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Anti Korupsi di desa setempat.

Program Desa Anti Korupsi diinisiasi KPK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan untuk sama-sama melakukan pencegahan tindakan korupsi yang dimulai dari desa.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Zainul Ulum saat menyerahkan hasil penilaian untuk Desa Sijenggung mengatakan, prestasi yang diraih Pemerintah Desa Sijenggung layak diapresiasi. "Tetapi penilaian ini bukan akhir dari pencanangan Desa Sijenggung sebagai satu dari 29 desa di Jawa Tengah yang terpilih sebagai desa anti korupsi. Ke depan, masih

banyak tantangan yang harus dihadapi Pemdes dan masyarakat Desa Sijenggung," tandas Zainul.

Menurut Zainul, setelah penilaian sangat butuh konsistensi dan keberanian untuk tetap berkomitmen. Sehingga implementasi anti korupsi tetap bisa terjaga. "Desa anti korupsi membutuhkan komitmen, dukungan dari semua pihak, sehingga semua komponen mulai dari pemerintah desa, masyarakat bisa terus menjaga nilai-nilai anti korupsi," ujarnya.

Kepala Desa Sijenggung, Suyono menyatakan bangga atas peran serta seluruh perangkat dan masyarakat.

"Semua bergotong-royong untuk mewujudkan Desa Sijenggung sebagai Desa Anti Korupsi. Alhamdulillah, mendapatkan nilai tinggi 97,5," katanya. (Mad)-d

DORONG PRODUK UNGGULAN 'GO DIGITAL'

Sukoharjo 'Launching' Kompas UMKM

SUKOHARJO (KR) Pemkab Sukoharjo terus melakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan mendorong *go digital*. Salah satunya dengan launching aplikasi Kemudahan Online Mengangkat Produk Asli Sukoharjo (Kompas) UMKM. Keberadaan aplikasi tersebut diharapkan dapat mempermudah pengembangan usaha UMKM bisa naik kelas dari sebelumnya dilakukan secara manual menjadi online.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengungkapkan hal itu saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan UMKM Naik Kelas dan Launching Kompas UMKM di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 Pemkab Sukoharjo, Jumat (22/9). Selain Bimbingan Teknis Pemberdayaan UMKM, juga diresmikannya Aplikasi Kompas UMKM.

Menurut bupati, perekonomian Indonesia saat ini dihadapkan pada berbagai perubahan yang cepat dan fundamental. Karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mendorong kondisi perekonomian yang lebih stabil di tengah isu resesi global saat ini.

Disebutkan, UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama ketika terjadi krisis, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada

rapkan Kabupaten Klaten dapat meraih penghargaan *Swasti Saba*.

Hal itu dikemukakan Yoga Hardaya saat menghadiri FGD Hasil Verifikasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat, Kamis (21/9) di Pendapa Umbul Besuki Kecamatan Polanharjo. "Terima kasih atas keper-

nya kepada kami, sehingga Kabupaten Klaten dapat melaksanakan tahapan verifikasi lapangan yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 20-21 September 2023," ungkapnya.

Wabup juga minta saran dan masukan agar dapat dijadikan referensi perbaikan ke depan. "Saya harap dari kegiatan ini mendapatkan hasil yang memuaskan dengan perolehan penghargaan Swasti Saba. Mohon maaf jika dalam pendampingan dari kami terdapat kekurangan," tandas Yoga Hardaya.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sekaligus Ketua Tim Verifikasi Lapangan KKS, Nevy Rinda Nugraini mengatakan, selama kun-



Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat launching Kompas UMKM.

an masyarakat. "Hal itu jika dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan

lapangan dua hari di Kabupaten Klaten hampir seluruhnya valid dan cukup baik. Tim verifikasi sepakat bahwa di Kabupaten Klaten secara umum sudah bagus dan masyarakatnya guyub rukun.

Tim verifikasi juga berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan semangat masyarakat Klaten untuk lebih hidup dengan sehat. "Berdasarkan hasil kunjungan kami selama dua hari, hampir seluruhnya valid. Sudah cukup baik dan masyarakat guyub rukun. Secara umum memang sudah bagus, namun masih ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi," ungkap Nevy Rinda.

Diharapkan, kondisi yang sudah baik itu bukan

mengantaskan kemiskinan, dan sarana pemasaran devisa bagi negara," tandas Etik Suryani.

Etik Suryani juga mengingatkan tantangan UMKM ke depan, yang harus diatasi dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal. "Untuk itu, pengembangan UMKM sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi," tambahnya. (Mam)-d

Klaten Berharap Meraih 'Swasti Saba'

KLATEN (KR) - Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya menyatakan berterimakasih kepada tim verifikasi kabupaten/kota sehat (KKS) atas pelaksanaan verifikasi lapangan di Kabupaten Klaten. Yoga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan masukan dan saran, sehingga diha-



Wabup Klaten bersama tim verifikasi Kabupaten/Kota Sehat.

rapkan Kabupaten Klaten dapat meraih penghargaan *Swasti Saba*.

Hal itu dikemukakan Yoga Hardaya saat menghadiri FGD Hasil Verifikasi Lapangan Kabupaten/Kota Sehat, Kamis (21/9) di Pendapa Umbul Besuki Kecamatan Polanharjo. "Terima kasih atas keper-

nya kepada kami, sehingga Kabupaten Klaten dapat melaksanakan tahapan verifikasi lapangan yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 20-21 September 2023," ungkapnya.

Wabup juga minta saran dan masukan agar dapat dijadikan referensi perbaikan ke depan. "Saya harap dari kegiatan ini mendapatkan hasil yang memuaskan dengan perolehan penghargaan Swasti Saba. Mohon maaf jika dalam pendampingan dari kami terdapat kekurangan," tandas Yoga Hardaya.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI sekaligus Ketua Tim Verifikasi Lapangan KKS, Nevy Rinda Nugraini mengatakan, selama kun-

semata-mata karena ada penilaian tetapi ini semua untuk masyarakat Klaten. "Dengan adanya penilaian ini, diharapkan dapat menjadikan Klaten yang semakin nyaman untuk ditinggali, sehat dan aman," tambah Nevy.

Ketua Tim Verifikasi KKS Kabupaten Klaten, Edy Sasongko juga berharap, dengan verifikasi lapangan kabupaten kota sehat di 9 tatanan, Kabupaten Klaten mampu memperoleh penghargaan Swasti Saba. "Kita semua berkomitmen mewujudkan Klaten menjadi kabupaten/kota sehat dan mendapatkan penghargaan Swasti Saba. Dengan mengajukan 9 tatanan sekaligus, harapan kita Klaten benar-benar menjadi Bersinar," tegas Edy Sasongko. (Sit)-d